

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

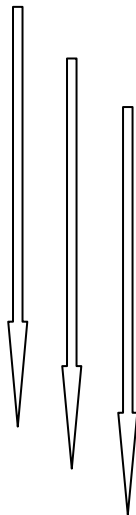
Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

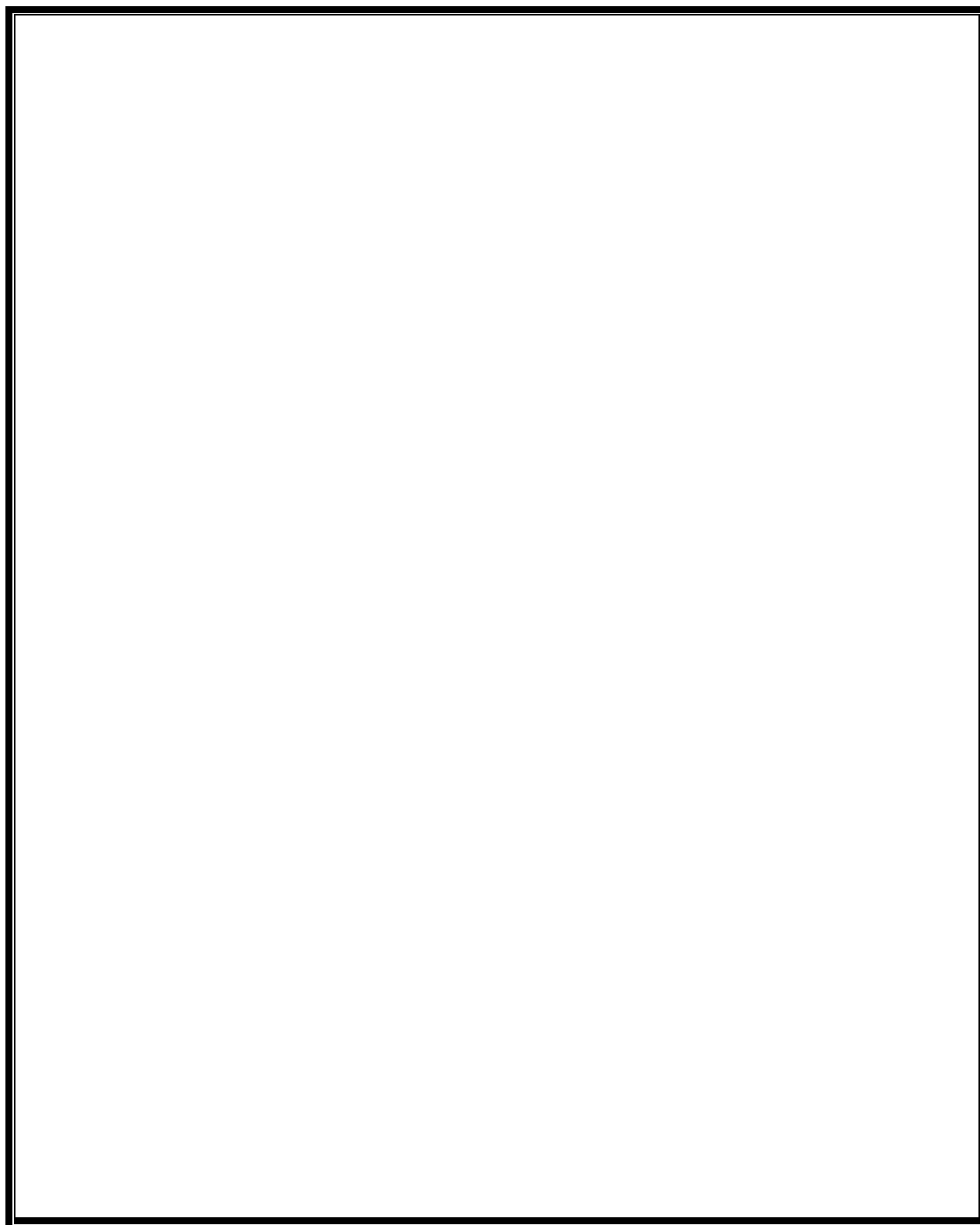


PELAPORAN KINERJA

TAHUN 2018



**INSPEKTORAT
KABUPATEN MALINAU**



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------|
| DAFTAR ISI..... | i |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Dasar Pembentukan Inspektorat..... | 1 |
| B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..... | 1 |
| C. Aspek Strategis Organisasi..... | 2 |
| D. Struktur Organisasi..... | 2 |
| E. Sumber Daya Manusia | 3 |
| F. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Yang Dihadapi Inspektorat..... | 4 |
| G. Sistematika Penyajian..... | 6 |
| BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 8 |
| A. Rencana Strategik Inspektorat 2016-2021..... | 8 |
| 1. Visi | 9 |
| 2. Tujuan Strategis Inspektorat | 9 |
| 3. Sasaran | 9 |
| 4. Indikator Kinerja | 10 |
| 5. Strategi dan Arah Kebijakan | 11 |
| 6. Program | 12 |
| B. Perjanjian Kinerja..... | 13 |
| BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA..... | 17 |
| A. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2018..... | 18 |
| B. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2018..... | 25 |
| 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja | 25 |
| Tahun 2017 dengan 2018 | |
| 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan | 30 |
| Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 | |
| C. Realisasi Anggaran | 32 |

| | |
|------------------------------|----|
| BAB IV : PENUTUP..... | 36 |
| LAMPIRAN | |
| RENCANA KINERJA TAHUN 2018 | |
| PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Inspektorat

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau.

Inspektorat merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.



2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu yang diberikan oleh Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut selanjutnya disusun Pelaporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi Inspektorat sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berpedoman pada Ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diakomodasi dalam Pelaporan Kinerja ini.

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :



1. Inspektur ;
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - 1) Sekretaris;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
 - 3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 4) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu I ;
4. Inspektur Pembantu II ;
5. Inspektur Pembantu III ;
6. Inspektur Pembantu IV ; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Kabupaten Malinau per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi/ jabatan dan golongan sebagai berikut :

1). Menurut Tingkat Pendidikan :

- | | | | |
|----------------------------|---|----|-------|
| a. Pasca Sarjana (S2) | = | 4 | orang |
| b. Sarjana (S1)/ Sederajat | = | 16 | orang |
| c. Sarjana Muda (D3) | = | 5 | orang |
| d. SLTA | = | 4 | orang |
| e. SLTP | = | - | orang |
| f. SD | = | - | orang |

2). Menurut Fungsi/Jabatan :

- | | | | |
|-----------------------|---|---|-------|
| a. Inspektur | = | 1 | orang |
| b. Sekretaris | = | 1 | orang |
| c. Inspektur Pembantu | = | 3 | orang |
| d. Kasubag | = | 3 | orang |



| | | | |
|-------------------------------|---|----|-------|
| e. Jabatan Fungsional Umum | = | 17 | orang |
| f. Jabatan Fungsional Auditor | = | 4 | orang |
| g. Jabatan Fungsional P2UPD | = | - | orang |

3). Menurut Golongan ;

| | | | |
|------------------------|---|---|-------|
| a. Golongan IV/c | = | 1 | orang |
| b. Golongan IV/b | = | 2 | orang |
| c. Golongan IV/a | = | 3 | orang |
| d. Golongan III/d | = | - | orang |
| e. Golongan III/c | = | 3 | orang |
| f. Golongan III/b | = | 7 | orang |
| g. Golongan III/a | = | 5 | orang |
| h. Golongan II/d | = | 3 | orang |
| i. Golongan II/c | = | 4 | orang |
| j. Golongan II/b | = | 1 | orang |
| k. Golongan II/a | = | - | orang |
| l. Golongan I/d | = | - | orang |
| m. Pegawai Tidak Tetap | = | - | orang |

F. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Yang Dihadapi Inspektorat

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Malinau, yaitu :

1. Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kabupaten Malinau

Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2016-2021 mempunyai visi yakni Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). Dalam rangka pencapaian visi tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau mempunyai 12 misi, misi ke-9 adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yakni Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung



terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Pemerintah Kabupaten Malinau juga menetapkan 5 (lima) Pilar Pembangunan Daerah dan 4 (empat) Komitmen Daerah serta 3 (tiga) program unggulan.

Untuk tercapainya visi, misi, program Pemerintah Kabupaten Malinau tersebut diatas, perlu ditingkatkannya integritas dan kompetensi aparatur di internal Inspektorat, sehingga pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku

2. Terdapat 3 (tiga) sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Dalam Negeri yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yakni sasaran ke :
 - 6) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
 - 7) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat
 - 10) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri
3. Terdapat 4 (empat) sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yakni sasaran ke :
 - 1) Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas Pengawasan
 - 2) Meningkatnya Pengawasan Perencanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 3) Meningkatnya Pengendalian Pemerintahan yang Efektif, Efisien sesuai Ketentuan Yang Berlaku
 - 4) Meningkatnya kualitas aparat pengawasan internal pemerintah kelas dunia (Level 3) pada Tahun 2018



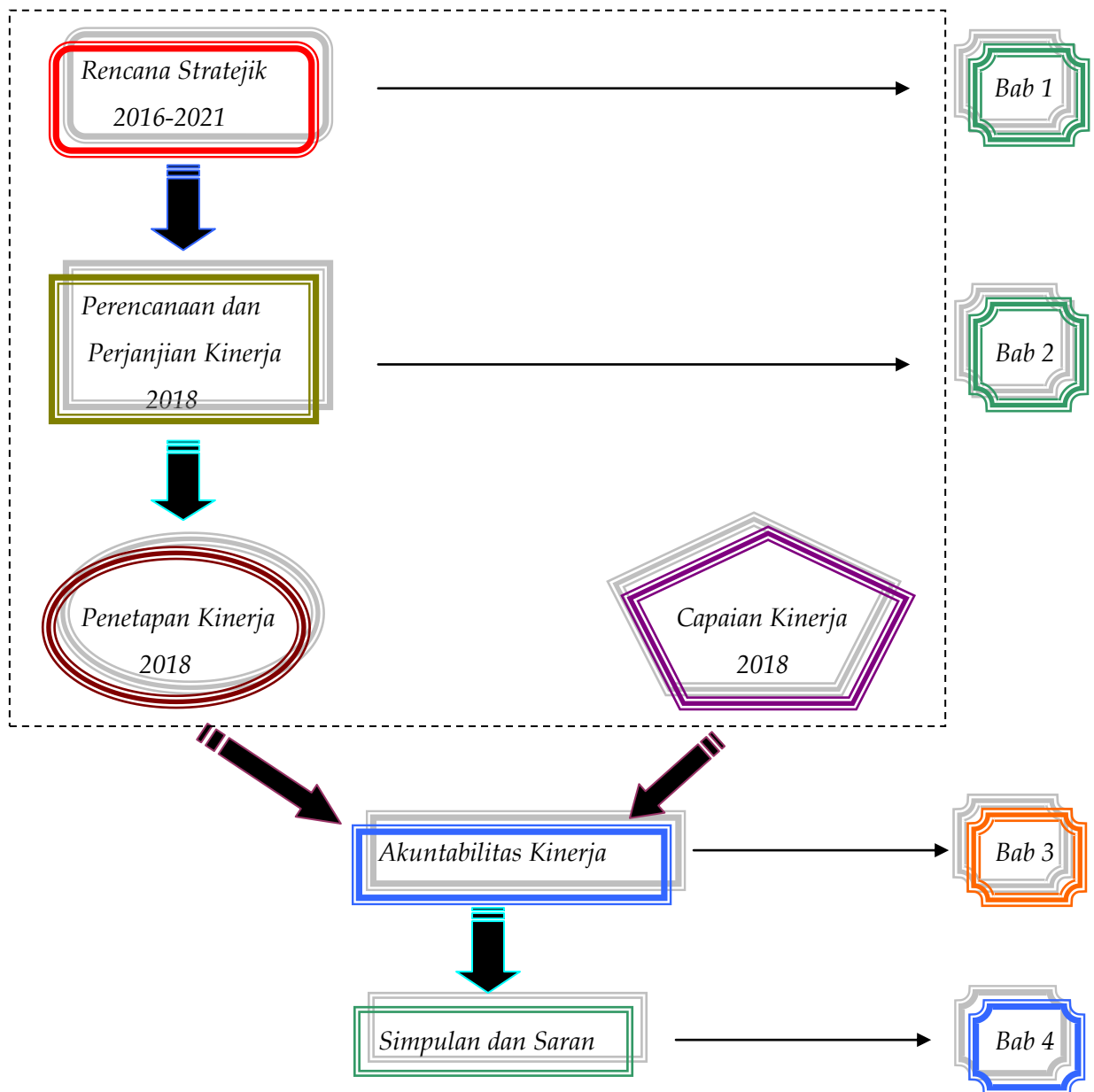
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau yaitu :

1. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Perencanaan pengawasan yang baik
3. Pelatihan Sumber Daya Aparatur
4. Koordinasi antar SKPD dan instansi terkait dalam menciptakan budaya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Pelaporan Kinerja ini bertujuan melihat sejauhmana kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau selama tahun 2018. Lalu capaian kinerja tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja/ketidaktercapaian kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Alur pikir penyajian Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau dapat digambarkan dalam bagan berikut :





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik Inspektorat 2016-2021

Tahun 2018 merupakan tahun kedua Inspektorat Kabupaten Malinau melaksanakan Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2016-2021 walaupun pada tahun 2016 merupakan masa transisi dari Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2011-2016 ke Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Tahapan pertama dimulai dari fase perencanaan yang berupa dokumen RENSTRA kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK), yang kedua adalah fase pengukuran kinerja yaitu melalui penggunaan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU), tahap ketiga fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Pelaporan Kinerja serta fase yang terakhir yaitu evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Dengan disusunnya Renstra Inspektorat diharapkan Inspektorat memiliki arah kebijakan yang jelas guna menunjang efektivitas organisasi pemerintah daerah sebagai unit organisasi yang otonom, berkinerja, berwawasan ke depan, serta menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun seperti yang telah tertuang pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.



1. Visi

Visi Inspektorat Kabupaten Malinau merefleksikan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan yang sekaligus memproyeksikan keberlanjutan upaya pengembangan dan penguatan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) agar mampu menjadi akselerator kegiatan Inspektorat, dan untuk menunjukkan bagaimana para *stakeholders* melihat, menilai, dan memberikan predikat terhadap Inspektorat sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Malinau.

Visi Pemerintah Kabupaten Malinau sesuai yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)”**,

2. Tujuan Strategis Inspektorat

Untuk melaksanakan tugas pokok & fungsi, maka Inspektorat Kabupaten Malinau perlu menetapkan tujuan yaitu sesuatu yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, ada 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai dari Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021 yaitu:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan & akuntabel.
- 2) Mewujudkan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif.

3. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam program dan kegiatan. Terkait dengan tujuan tersebut, Inspektorat menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu renstra yang



telah disusun. Adapun sasaran dari Renstra Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pencegahan tindakan pelanggaran hukum.
- 2) Meningkatkan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan penunjang pengawasan.
- 4) Meningkatkan transparansi & akuntabel proses pemerintahan.
- 5) Meningkatkan pemberian sanksi & adukasi hukum secara konsisten adil & bertanggung jawab.

4. Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis Inspektorat tahun 2016-2021, maka ditetapkan Indikator Kinerja sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

| No | Tujuan | Sasaran | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN |
|----|---|---|---|
| 1 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparansi & akuntabel | Meningkatnya reformasi birokrasi | 1. Persentase OPD yang melaksanakan zona integritas dan whistle blowing sistem. |
| | | | 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas. |
| | | | 3. Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP |
| | | | 4. Persentase APIP yang mengikuti pendidikan & pelatihan bidang pengawasan |
| | | Meningkatnya transparansi & akuntabilitas proses pemerintahan | 1. Persentase OPD yang dilakukan 2. Penilaian kinerja 3. Persentase pelaksanaan reviu RKA, |



| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | LKPD, Penyerapan Anggaran, dan LkjIP pada Pemerintah Kabupaten Malinau. |
| | | Meningkatnya pemberian sanksi & advokasi hukum secara konsisten adil dan bertanggungjawab | <ol style="list-style-type: none">1. Persentase OPD yang dilakukan2. Penilaian kinerja3. Persentase pelaksanaan reviu RKA, LKPD, Penyerapan Anggaran, dan LkjIP pada Pemerintah Kabupaten Malinau |
| | | Meningkatnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Persentase penyelesaian Kasus sesuai pemerintah Bupati/ Wakil Bupati dan pengaduan masyarakat2. Persentase pemeriksaan terpadu dengan instansi terkait3. Persentase lembaga terkait (BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi, BKN Regional) yang dapat dilakukan koordinasi dan konsultasi |
| | | Meningkatnya sarana prasarana penunjang pengawasan | <ol style="list-style-type: none">1. Persentase tersediannya Administrasi dan sarana prasarana perkantoran |

5. Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan melakukan analisa pada faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang didasarkan pada analisis SWOT maka langkah selanjutnya adalah penyusunan strategi Inspektorat Kabupaten Malinau.

Strategi Inspektorat Kabupaten Malinau Adalah :

1. Penciptaan budaya kerjandisiplin dan perubahan pola pikir administrasi yang terpadu.
2. Peningkatan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah.
3. Pelaksanaan penilaian kinerja OPD.
4. Pelaksanaan reviu anggaran dan kinerja daerah.



5. Pembinaan & pengembangan hukum terhadap aparat pemerintah dan masyarakat.
6. Peningkatan koordinasi & kerjasama dalam pembinaan dan penegakan hukum.
7. Menyediakan sarana pendukung pengawasan.

Kebijakan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi
2. Pelatihan Sumber Daya Aparatur.
3. Melakukan penilaian kinerja OPD secara komprehensif.
4. Melakukan reviu RKA OPD, reviu LKPD, LKJIP dan penyerapan anggaran.
5. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan permintaan pihak terkait.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kompetensinya.
8. Pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pengawasan.

6. Program

Dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian program dan kegiatan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Malinau untuk tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, Dan Keuangan.



2. Program Pengawasan dalam rangka Percepatan Menuju *Good Governance, Clean Government*, dan Pelayanan Publik.
3. Program Penunjang Pengawasan.
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. Perjanjian Kinerja

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan Inspektorat Kabupaten Malinau menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang mengacu pada rencana strategis 2016-2021 dengan tabel sebagai berikut :

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN |
|--|---|--------------------------------------|--|----------------|
| Meningkatnya sarana & Prasarana penunjang pengawasan | a. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Oprasional | 17 unit | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 43.000.000,00 |
| | b. Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor | 41 unit | b. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 12.300.000,00 |
| | c. Tersedianya ATK | 36 jenis | c. Penyediaan alat tulis kantor | 99.144.519,00 |
| | d. Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang Cetak dan Penggandaan | 80.000 lbr | d. Penyediaan barang cetakan, penggandaan, dan ATK | 32.000.000,00 |
| | | 6 jenis | e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 116.308.000,00 |
| | | 14 Unit | f. Penilaian Angka Kredit | 36.890.000,00 |
| | | 5 Fungsional Tertentu | | |
| | Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya | 12/ 7 kecamatan +5 lembaga | 2. Program Penunjang Pengawasan Koordinasi Program Pengawasan | 500.399.000,00 |



| | | | | |
|--|--|----------------------|--|---------------------------------|
| Meningkatnya pebagian sanksi & advokasi hukum secara adil & bertanggung jawab. | a. Terlaksananya pengawasan SKPD, desa, RT yang baik sesuai dengan PKPT, pengaduan masyarakat, dan terpadu dengan instansi terkait | 36 obrik | 3. Program Pengawasan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, dan Keuangan a. Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah | 472.436.202 |
| | b. Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Sesuai Perintah Bupati/ Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat | 29 Obrik/Entitas | b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa | 1.076.520.520.000 |
| | c. Jumlah laporan reviu | 1 LKPD 52 OPD | c. Penanganan Reviu LKPD Tahun 2017 d. Reviu Penyerapan | 33.245.000 54.400.000,00 |



Inspektorat Kabupaten Malinau

| | | | Anggaran | |
|----------------------------------|--|-------------|---|----------------|
| | | 10 Kasus | e. Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan Benturan Kepentingan | 245.440.000,00 |
| | | 52 OPD | f. Penilaian Kinerja OPD | 267.871.000 |
| | | 1 Laporan | g. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau | 25.500.000,00 |
| | | 52 OPD | h. Reviu Rencana Kerja Anggaran | 25.500.000,00 |
| Meningkatnya reformasi birokrasi | | | 4. Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governance, Clean Government, Dan Pelayanan Publik | |
| | | 45 LHP | a. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan | 85.118.000,00 |
| | | 17 Aparatur | b. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) | 236.449.000,00 |
| | | 10 OPD | c. Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Malinau | 35.700.000,00 |
| Jumlah | | | | 3.477.920.721 |

Jumlah anggaran belanja langsung dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2018 senilai Rp 3.477.920.721 yang terbagi dalam 4 (Empat) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan, dengan masing- masing indikator, target dan alokasi anggaran masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut dalam tabel diatas, dengan rincian program :



- | | |
|--|------------------|
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp 419.342.519 |
| 2. Program Penunjang Pengawasan | Rp 500.399.000 |
| 3. Program Pengawasan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, dan Keuangan | Rp 2.200.919.202 |
| 4. Program Pengawasan dalam rangka Percepatan Menuju <i>Good Governance, Clean Government</i> , dan Pelayanan Publik | Rp 1.076.520.000 |

Rp 3.477.920.721



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2018 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renstra (Rencana Strategis) Inspektorat 2016-2021. Dengan mengacu pada Renstra tersebut dan difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat 2016-2021, kemudian ditetapkan 3 (tiga) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis Inspektorat sebagai berikut :

Tujuan Strategis :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan & akuntabel.
- 2) Mewujudkan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif.

Tujuan Strategis tersebut dijabarkan menjadi 5 (lima) Sasaran Strategis berikut :

- 1) Meningkatnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum.
- 2) Meningkatnya reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatnya penunjang pengawasan.
- 4) Meningkatnya transparansi & akuntabilitas proses pemerintahan.
- 5) Meningkatnya pemberian sanksi & advokasi hukum secara konsisten adil dan bertanggungjawab.

Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan di atas, dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran. Dengan ini disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.



A. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2018

Tabel Capaian Kinerja Inspektorat pada Tahun 2018 :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target Renja | Realisasi | Persentase (%) |
|--|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Meningkatnya pemberian sanksi & advokasi hukum secara konsisten adil & bertanggungjawab. | 1. Terlaksananya pengawasan SKPD, desa, RT yang baik sesuai dengan PKPT, pengaduan masyarakat, dan terpadu dengan instansi terkait | 28 SKPD & 29 obrik / 94 desa | 28 SKPD & 28 obrik / 92 desa | 100,00 & 100,00 |
| Meningkatnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum. | 2. Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Sesuai Perintah Bupati/ Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat | 10 kasus | 5 kasus | 50 |
| Meningkatnya Transparansi & akuntabilitas proses pemerintahan. | 1. Terwujudnya RKA yang baik | - | - | - |
| | 2. Jumlah laporan reuiu | 1 LKPD | 1 LKPD | 100,00 |
| | 3. Pelaksanaan Penilaian Kinerja SKPD | 52 OPD | 52 OPD | 100,00 |
| Meningkatnya reformasi birokrasi | 1. Terlaksananya reformasi birokrasi pada SKPD | - | - | - |
| | 2. Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan. | 17 Aparatur | 17 Aparatur | 100,00 |
| | 3. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang dievaluasi | 45 LHP | 45 LHP | 100,00 |
| Meningkatnya sarana prasarana penunjang pengawasan | 1. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Benda Pos | - | - | - |
| | 2. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Oprasional | 17 unit | 17 unit | 100,00 |
| | 3. Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor | 41 unit | 41 unit | 100,00 |
| | 4. Tersedianya ATK | 36 jenis | 36 jenis | 100,00 |



| | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------|
| | 5. Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang Cetakan dan Penggandaan | 80.000 lbr | 80.000 lbr | 100,00 |
| | 6. Tersedia Peralatan Kantor berupa Laptop, Komputer, Printer | - | - | - |
| | 7. Tersedianya Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD | 5 Fungsional | 2 Fungsional | 40,00 |
| | 8. Tersedianya PKPT, RKA, DPA dan Lakip Serta laporan Realisasi Fisik Lainnya | - | - | - |
| | 9. Terwujudnya Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya | 7 kecamatan + 5 lembaga | 1 kecamatan + 5 lembaga | 100,00 |
| RATA - RATA | | | | 89,598 |

Penjelasan capaian kinerja Inspektorat per sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Terwujudnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum

- a. Indikator pertama : Terlaksananya pengawasan OPD, desa, RT yang baik sesuai dengan PKPT, pengaduan masyarakat, dan terpadu dengan instansi terkait

Kegiatan Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditargetkan 28 obrik OPD dan terlaksana 28 obrik OPD sehingga terealisasi 100,00%. Pengawasan terhadap SKPD tersebut dilaksanakan kepada

1. Dinas Pendidikan,
2. Dinas Kebudayaan dan pariwisata,
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB,
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan,



7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Perhubungan,
10. Dinas Pertanian,
11. Dinas Lingkungan Hidup Daerah,
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Litbang ,
13. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,
14. Badan Kepegawaian, Pendidikan,& Pelatihan
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16. Badan Kesbangpolkesosek,
17. Bagian Tata pemerintahan Setkab,
18. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab,
19. Bagian Ekonomi Setkab,
20. Bagian Pembangunan Setkab
21. Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara Setkab
22. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setkab
23. Bagian Organisasi Setkab
24. Bagian Umum Setkab
25. Bagian Humas dan Protokol Setkab
26. Satuan Polisi pamong Praja & Pemadam Kebakaran
27. Sekretariat DPRD
28. RSUD

Kegiatan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa ditargetkan 92 desa dan terlaksana pengawasan terhadap 15 kantor camat dan 92 desa sehingga terealisasi 100,00%. Pengawasan tersebut dilaksanakan terhadap :

- Kantor Camat Malinau Barat, Desa Tanjung Lapang, Desa Kuala Lapang,



- Kantor Camat Malinau Kota, Desa Malinau Kota, Desa Tanjung Keranjang,
- Kantor Camat Mentarang, Ds Pulau Sapi, Ds Mentarang Baru, Ds Lidung Kemenci,
- Kantor Camat Malinau Utara, Ds Malinau Seberang, Ds Respen Tubu,
- Kantor Camat Malinau Selatan Hulu, Ds Metut, Ds Halangan, Ds Punan Mirau, Ds Long Rat, Ds Halanga, Ds Long Lake, Ds Nahak Ramo, Long Jalan
- Kantor Camat Malinau Selatan, Ds Long Loreh, Ds Sengayan, Ds Bila Bekayuk, Ds Paya Seturan, Ds langap, Ds Pelancau, Ds Nunuk Tanah Kibang, Ds Punan Rian
- Kantor Camat Malinau Selatan Hilir, Setarap, Ponan Setarap, Ds Setulang, Ds Gong Solok, Ds Punan Gong Solok, Ds Batu Kajang, Ds long Adiu, Ds Punan Adiu
- Kantor Camat Mentarang Hulu, Ds Long Semamu, Ds Sulit, Ds Long Simau
- Kantor Camat Pujungan dan Ds Long Paliran, Ds Long Bena, Ds Long Belaka Pitau
- Kantor Camat Bahau Hulu dan Ds Long Uli, Ds Long Tebulo, Ds Long Kemuat, Ds Long Berini, Ds Apau Ping
- Kantor Camat Kayan Hulu dan Ds Nawang Baru, Ds Long Temuyat, Ds Long Betaoh, Ds Long payau
- Kantor Camat kayan Selatan dan Ds Metulang, Ds Sungai Barang, Ds Lidung payau, Ds Long Uro
- Kantor Camat Kayan Hilir dan Ds Sei Anai, Ds Long Metun
- Kantor Camat Sungai Boh dan Ds Dumu Mahak, Ds Long Lebusan, Ds Ds Data Baru, Ds Long Top, Ds Agung Baru, Pengawasan ke Ds Long Aran, Long Lame, Ketaman, Long Pua, Long Jeret, Long Aran, Long Lame, Ketaman, Long Pua, Long Jeret kec Pujungan



- Kantor Camat Sungai Tubu dan Ds Long Nyau, Ds Long Ranau, Ds Long Titi, Rian Tubu
- Ds Putat, Belayan, Seruyung, Salap, Lubak Manis, kec. Malinau Utara
- Ds Punan Bengalun, Sesua, Sempayang kec. Malinau Barat
- Ds Taras, Long Bila, Long Kenipe, Sentaban kec. Malinau Barat
- Ds Temalang, Long Liku, Long Gafid kec. Mentarang
- Ds Long Bisai, Paking, Harapan Maju kec. Mentarang.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas proses pemerintahan

- a. Indikator pertama : Jumlah laporan reviu

Kegiatan Penanganan Reviu LKPD Tahun 2017 ditargetkan dilaksanakan reviu terhadap 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dan terealisasi 100%.

- b. Indikator kedua : Pelaksanaan Penilaian Kinerja SKPD

Kegiatan Penilaian Kinerja SKPD ditargetkan dilaksanakan terhadap 52 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dan terealisasi 100%.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Reformasi Birokrasi

- a. Indikator Kedua : Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang dievaluasi.

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan ditargetkan 45 LHP yang dapat ditindaklanjuti dan terealisasi 45 LHP (100%).

Indikator Pertama Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan dilaksanakan melalui Kegiatan Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ditargetkan terhadap 17 aparatur dan terealisasi 17 aparatur (100%).

Indikator Kedua yakni terlaksananya penilaian maturasi SPIP Inspektorat, DPUPR & perkim, DPM PTSP & TK, DLH, Disperindag,



Dinkes, DPMD, Disdik, Disdukcapil, Dispertan, Bappeda & Litbang, BPKD, BKPP, Satpol PP, RSUD, Bagian Organisasi aparatur 100%.

Aparatur Inspektorat yang mengikuti pelatihan adalah Drs. Wilson, Supomo Bayu Aji, A KS.; Marten Dermawan, SE., M. Si.; Yohanis, SE, M. Si.; I Ketut Agustina, SH.; Suritman, ST.; Elim Pasomba, ST; Antung Nursehat, SE.; Irawati, SE; Anggi Rahnaniah, A.Md.; Juliana.; Zidcon Riscanova, A.Md.; Nick Sutaji Kaprianus, ST.; Nataliani, ST.; Ida Lela, S.Kom, M.Si.; Yance, SE.; Septinawati, SE.; Herce Juari, ST., M.Si.; Ismaya Mawardi .; Hasriadi, A.Md.; Dian Safitri, A.Md.; Francis, S.Pd, M.Pd.; Efanles, S. Pd, M.Si.; Ratna Andika, SE., M.Si .; Roy Christian, S.Hut .; Pelatihan yang diikuti antara lain adalah Peningkatan Kapabilitas APIP, Ujian Sertifikasi Auditor, Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah dan Tata Cara Pengisian & Pelaporan SPT, Diklat Auditor Ahli, Work Shop Peningkatan KAPIP, Pembekalan Uji Kompetensi Inpasing P2UPD, dan Workshop Reviu Pengelolaan Anggaran, Diklat Pembentukan Auditor Terampil.

Indikator tersediannya peralatan kantor 14 Unit telah terealisasi 100% yaitu Gps 2 Unit, mesin ketik manual 1 unit, Laptop 6 Unit, Printer 1 Unit, Proyektor 1 Unit, dan Alat perekam 3 Unit.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya sarana prasarana

- a. Indikator pertama : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Oprasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ditargetkan 17 unit (kendaraan dinas roda 4) dan terealisasi 100%.

- b. Indikator kedua : Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ditargetkan perbaikan terhadap 14 unit yakni 5 unit komputer, 5 unit laptop, dan 4 unit printer. Perbaikan tersebut terealisasi 100%.

- c. Indikator ketiga : Tersedianya ATK



Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target 36 jenis barang pakai habis dan terealisasi 100%.

- d. Indikator keempat : Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan target 80.000 lembar fotocopy dan terealisasi 100%.

- e. Indikator kelima : Tersediannya peralatan kantor 14 Unit telah terealisasi 100% yaitu Gps 2 Unit, mesin ketik manual 1 unit, Laptop 6 Unit, Printer 1 Unit, Proyektor 1 Unit, dan Alat perekam 3 Unit.

5. Sasaran 5 : Meningkatkan pencegahan tindakan pelanggaran hukum.

- a. Indikator pertama : Terwujudnya Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya.

Terwujudnya Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya pada tahun 2018 ditargetkan koordinasi dengan 7 kecamatan dan 5 lembaga dan terealisasi 7 kecamatan dan 5 lembaga (Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Mentarang, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu serta lembaga Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Bulungan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, Kementrian Dalam Negeri di Jakarta, dan BKN Regional VIII Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sehingga realisasi 100,00%.



B. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2018

Analisis Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2017 sebagai bahan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Capaian Tahun 2017 | Tahun 2018 | | Kenaikan / Penurunan 2017 - 2018 (%) |
|-----|--|--|-------------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | | Target Renja | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Meningkatnya pemberian sanksi & advokasi hukum secara konsisten adil dan bertanggungjawab. | 1. Terlaksananya pengawasan OPD desa, RT yang baik sesuai dengan PKPT, pengaduan masyarakat, dan terpadu dengan instansi terkait | Obrik SKPD & Obrik Desa | 25 & 36 | 28 & 29 | 28 & 29 | 90,27 |
| 2. | Meningkatnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum | 1. Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Sesuai Perintah Bupati/ Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat | Kasus | 3 | 5 | 5 | 166,66 |
| | | 2. Terwujudnya Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya | Kasus kcmtn + lembaga | 3 + 5 | 7 + 5 | 7 + 5 | 166,66 |
| 3. | Meningkatnya transparansi & akuntabilitas proses pemerintahan | 1. Terwujudnya RKA yang baik | SKPD | - | - | - | - |
| | | 2. Jumlah laporan revidu | LKPD | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| | | 3. Pelaksanaan Penilaian Kinerja SKPD | SKPD | 56 | 52 | 52 | 92,85 |



| | | | | | | | |
|----|--|--|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 4. | Meningkatnya reformasi birokrasi | 1. Terlaksananya reformasi birokrasi pada SKPD | laporan | - | - | - | - |
| | | 2. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang dievaluasi | LHP | 35 | 45 | 45 | 128,57 |
| | | 3. Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan | orang | 17 | 25 | 17 | 100,00 |
| 5. | Meningkatnya sarana prasarana penunjang pengawasan | 1. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Benda Pos | lembar | - | - | - | - |
| | | 2. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Oprasional | unit | 2 | 17 | 17 | 850 |
| | | 3. Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor | unit | 17 | 41 | 41 | 241,17 |
| | | 4. Tersedianya ATK | jenis | 41 | 36 | 36 | 87,80 |
| | | 5. Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang Cetak dan Penggandaan | lembar | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100,00 |
| | | 6. Tersedia Peralatan Kantor berupa Laptop, Komputer, Printer | jenis | - | 14 | 14 | 14,00 |
| | | 7. Tersedianya Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD | orang | - | 17 | 2 | 200 |
| | | 8. Tersedianya PKPT, RKA, DPA dan Lakip Serta laporan Realisasi Fisik Lainnya | doku men | - | - | - | - |

Penjelasan capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 sebagai berikut :

- 1. Sasaran 1 : Meningkatkan pemberian sanksi & advokasi hukum secara konsisten adil dan bertanggungjawab.**



- a. Indikator pertama : Terlaksananya pengawasan OPD, desa, RT yang baik sesuai dengan PKPT, pengaduan masyarakat, dan terpadu dengan instansi terkait
- Kegiatan Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tahun 2018 terealisasi 28 obrik dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 25 obrik. Kegiatan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa pada tahun 2018 terealisasi 29 obrik (92 desa dan 13 kantor camat) dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 9 (36 desa dan 4 kantor camat) obrik. Hal ini terjadi karena waktu yang tersedia berkurang dan Sumber daya manusia yang terbatas.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya transparansi & akuntabilitas proses pemerintahan

- a. Indikator pertama : Jumlah laporan reviu
- Kegiatan Penanganan Reviu LKPD Tahun 2017 pada tahun 2018 terealisasi 1 LKPD dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 1 LKPD sehingga tidak terjadi kenaikan/ penurunan karena objek reviu sama yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
- b. Indikator kedua : Pelaksanaan Penilaian Kinerja SKPD
- Kegiatan Penilaian Kinerja SKPD pada tahun 2018 terealisasi 52 OPD dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 56 sehingga terjadi penurunan sebesar 92,85%. Hal ini terjadi karena tidak ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja pada tahun 2017.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Reformasi Birokrasi

- a. Indikator pertama : Terlaksananya reformasi birokrasi pada SKPD
- Indikator Terlaksananya reformasi birokrasi pada SKPD pada tahun 2018 tidak terlaksana karena kegiatan Aksi Pencegahan dan



Pemberantasan Korupsi telah dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau.

- b. Indikator kedua : Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang dievaluasi

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada tahun 2018 terealisasi 45 LHP dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 35 LHP sehingga terjadi kenaikan sebesar 28,57%.

- c. Indikator ketiga : Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan

Indikator Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan dilaksanakan melalui Kegiatan Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada tahun 2018 terealisasi 25 orang dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 17 orang sehingga terjadi penurunan sebesar 47,05 %. Hal ini terjadi karena anggaran mengalami penurunan pada tahun 2018 yakni sebesar Rp 122.348.809,00 dengan rincian pada tahun 2017 anggaran senilai Rp 114.100.191,00 dan pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp 236.449.000,00.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya sarana prasarana penunjang pengawasan

- d. Indikator pertama : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Oprasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pada tahun 2018 terealisasi 17 unit dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 2 unit sehingga terjadi kenaikan sebesar 850%. Hal ini terjadi karena anggaran mengalami kenaikan pada tahun 2018 yakni sebesar Rp 17.500.000,00 dengan rincian pada tahun 2017 anggaran senilai Rp 25.500.000,00 dan pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp 43.000.000,00.

- e. Indikator kedua : Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor



Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja pada tahun 2018 terealisasi 41 unit dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 17 unit sehingga terjadi kenaikan sebesar 2,41%. Hal ini terjadi karena anggaran mengalami penurunan pada tahun 2018 yakni sebesar Rp 17.700.000,00 dengan rincian pada tahun 2017 anggaran senilai Rp 30.000.000,00 dan pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp 12.300.000,00.

f. Indikator ketiga : Tersedianya ATK

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada tahun 2018 terealisasi 36 jenis dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 41 jenis sehingga terjadi penurunan sebesar 87,80 %. Hal ini terjadi karena anggaran mengalami kenaikan pada tahun 2018 yakni sebesar Rp 38.590.219,00 dengan rincian pada tahun 2017 anggaran senilai Rp 60.554.300,00 dan pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp 99.144.519,00.

g. Indikator keempat : Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada tahun 2018 terealisasi 80.000 lembar sebesar 100,00%. Hal ini tidak terjadi perubahan anggaran pada tahun 2017 dengan rincian pada tahun 2017 anggaran senilai Rp 32.000.000,00 dan pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp 32.000.000,00

5. Sasaran 5 : Meningkatnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum

a. Indikator pertama : Terwujudnya Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya.

Terwujudnya Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya pada tahun 2018 terealisasi 7 kecamatan dan 5 lembaga dibandingkan



dengan tahun 2017 terealisasi 3 kecamatan & 5 lembaga sehingga terjadi kenaikan sebesar 166,66%.

- b. Indikator Kedua : Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Sesuai Perintah Bupati/ Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat.

Kegiatan Penanganan pengaduan masyarakat, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan benturan kepentingan pada tahun 2018 terealisasi 5 kasus dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 3 kasus sehingga terjadi peningkatan sebesar 66,66%. Hal ini terjadi karena anggaran mengalami kenaikan pada kegiatan ini yakni sebesar Rp 170.440.000,00 yaitu pada tahun 2018 dengan anggaran Rp 245.440.000,00 dan pada tahun 2017 anggaran sebesar Rp 75.000.000,00

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Realisasi Tahun 2018 | Target Renstra | | % Capaian Thd Target Renstra | |
|-----|--|---|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2017 (%) | 2018 (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) 8=5/6 | (9) 9=5/7*100% |
| 1. | Meningkatnya pemberian sanksi & advokasi hukum secara konsisten adil dan bertanggung jawab | 1. Terlaksananya pengawasan OPD desa, RT yang baik sesuai dengan PKPT, pengaduan masyarakat, dan terpadu dengan instansi terkait | Obrik SKPD & Obrik Desa | 13 & (92 desa) | 28 & 29 | 28 & 29 | 46,42 & 17,24 | 46,42 & 17,24 |
| 2. | Meningkatnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum | 1. Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Sesuai Perintah Bupati/ Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat 2. Terwujudnya konsultasi, koordinasi tindak lanjut | Kasus Kecamatan + Lembaga | 5 7 + 5 | 3 3 + 5 | 5 7 + 5 | 25 33,33 | 60 100,00 |



| | | | | | | | | |
|----|---|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | hasil temuan | | | | | | |
| 3. | Meningkatnya transparansi & akuntabilitas proses pemerintahan | 1. Terwujudnya RKA yang baik | SKPD | - | - | - | - | - |
| | | 2. Jumlah laporan revidi | LKPD | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | | 3. Pelaksanaan Penilaian Kinerja SKPD | SKPD | 52 | 56 | 52 | 92,85 | 100,00 |
| 4. | Meningkatnya reformasi birokrasi | 1. Terlaksananya reformasi birokrasi pada SKPD | laporan | - | - | - | - | - |
| | | 2. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang dievaluasi | LHP | 45 | 35 | 45 | 28,57 | 100,00 |
| | | 3. Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan | orang | 25 | 17 | 25 | 47,05 | 100,00 |
| 5. | Meningkatnya sarana prasarana penunjang pengawasan | 1. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Benda Pos | lembar | - | - | - | - | - |
| | | 2. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Oprasional | unit | 17 | 2 | 17 | 100,00 | 13,33 |
| | | 3. Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor | unit | 41 | 17 | 41 | 41,17 | 100,00 |
| | | 4. Tersedianya ATK | jenis | 36 | 41 | 36 | 87,80 | 100,00 |
| | | 5. Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang Cetak dan Penggandaan | lembar | 80.000 | 62.500 | 80.000 | 128 | 100,00 |
| | | 6. Tersedia Peralatan Kantor berupa Laptop, Komputer, Printer | jenis | - | - | - | - | - |
| | | 7. Tersedianya Pelayanan Penilaian | orang | 25 | 15 | 25 | 66,66 | 100,00 |



| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|
| | | Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor/ P2UPD | | | | | | |
| | | 8. Tersedianya PKPT, RKA, DPA dan Lakip Serta laporan Realisasi Fisik Lainnya | dokum en | - | - | - | - | - |
| | | 9. Terwujudnya Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya | kcamtan + lembaga | 7 + 5 | 3 + 5 | 7 + 5 | 33,33 | 100,00 |

C. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Inspektorat tahun 2018 disajikan menurut sasaran, sesuai tabel berikut :



Inspektorat Kabupaten Malinau

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Tahun 2018 | | | | Program / Kegiatan | Tahun 2018 | | |
|--|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|---|--------------|--------------------|-----------|
| | | Satuan | Target DPA | Realisasi Fisik | % capaian | | Anggaran DPA | Realisasi Keuangan | % capaian |
| Meningkatkan sarana prasarana Penunjang Pengawasan | a. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Oprasional | unit | 17 | 17 | 100,00 | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 43.000.000 | 36.628.700 | 85,18 |
| | b. Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor | | | 14 | 100,00 | a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | | | |
| | c. Tersedianya ATK | unit | 36 | 36 | 100,00 | b. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 12.300.000 | 12.300.00 | 100,00 |
| | d. Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang Cetak dan Penggandaan | jenis | 36 | 80.000 | 100,00 | c. Penyediaan alat tulis kantor | 99.144.519 | 98.856.000 | 99,71 |
| | | lembar | 80.000 | | | d. Penyediaan barang cetakan, penggandaan, dan ATK | 32.000.000 | 32.000.000 | 100,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Meningkatkan pencegahan tindakan pelanggaran hukum | Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya | kcamtan lembaga | 7 + 5 | 7 + 5 | 100,00 | 2. Program Penunjang Pengawasan Koordinasi Program Pengawasan | 500.399.000 | 466.567.237 | 93,24 |
| Meningkatkan pemberian sanksi & advokasi hukum secara konsisten adil dan bertanggung jawab | a. Terlaksananya pengawasan SKPD, desa, RT yang baik sesuai dengan PKPT, pengaduan masyarakat, dan terpadu dengan instansi terkait | Obrik SKPD & Desa | 7 + 5 | 7 + 5 | 100,00 | 3. Program Pengawasan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, dan Keuangan | | | |



Inspektorat Kabupaten Malinau

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|----|----|--------|--|---------------|---------------|--------|
| Meningkatnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum | | | | | | a. Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah | 472.436.202 | 257.262.000 | 100,00 |
| | b. Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Sesuai Perintah Bupati/ Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat | Kasus | 5 | 5 | 100,00 | b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa | 1.076.520.000 | 1.046.428.808 | 97,20 |
| | c. Jumlah laporan revidi | LKPD | 1 | 1 | 100,00 | c. Penanganan pengaduan masyarakat, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan benturan kepentingan | 245.440.000 | 84.662.300 | 34,49 |
| | d. Pelaksanaan Penilaian Kinerja SKPD | SKPD | 52 | 52 | 100,00 | d. Penanganan Revidi LKPD Tahun 2017 | 33.245.000 | 33.245.000 | 100,00 |
| 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan | | | | | | | | | |



Inspektorat Kabupaten Malinau

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------|----|----|--------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | n KDH Penilaian Kinerja SKPD | 267.871.000 | 267.871.000 | 100,00 |
| Terwujudnya reformasi birokrasi | | | | | | 5. Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governance, Clean Government, Dan Pelayanan Publik | | | |
| | a. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang dievaluasi | LHP | 45 | 45 | 100,00 | a. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan | 85.118.000 | 84.678.779 | 99,48 |
| | b. Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan | orang | 25 | 25 | 100,00 | b. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | 236.449.000 | 216.061.362 | 91,38 |
| | JUMLAH | | | | | | 1.888.092.721 | 1.887.252.721 | 95,00 |





BAB IV

PENUTUP

Pelaporan Kinerja Inspektorat Tahun 2018 menyajikan data dan informasi yang relevan sehingga dapat menyimpulkan keberhasilan Inspektorat Kabupaten Malinau.

Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yang di dalamnya menyajikan pernyataan visi misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan, melalui program dan kegiatan yang dilakukan. Pelaporan Kinerja ini juga menyajikan Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2017 dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2018 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2017), dengan target kinerja tahun 2018, dengan target renstra tahun 2016-2021.

Analisis capaian kinerja tahun 2018 meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis 2016-2021. Dalam analisis dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Jumlah keseluruhan anggaran Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2018 senilai Rp 9.495.854.686,05 yang terbagi atas belanja langsung senilai 3.477.920.721,00 dan belanja tidak langsung Rp 6.017.933.965,05 dengan realisasi keuangan Rp 6.344.997.145,00 yakni belanja langsung Rp 947.467.663,00 dan belanja tidak langsung Rp 5.397.529.482,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar **97,08%** dan realisasi fisik rata-rata **129,43%** yang terbagi atas 4 (empat) program dan 12 (dua belas) kegiatan, sehingga secara umum Inspektorat telah melaksanakan kinerja dengan baik



Inspektorat Kabupaten Malinau

Laporan Kinerja Tahun 2018 menyajikan perkembangan yang terjadi sehingga laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan dalam mengambil kebijakan untuk mewujudkan Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang professional, handal dan mampu menjadi pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Laporan Kinerja ini juga dapat digunakan sebagai dokumen pendukung Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau secara keseluruhan. Laporan Kinerja ini dapat dipakai sebagai alat penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pimpinan, diucapkan terima kasih.

Malinau, 22 Januari 2019

Inspektur, GA



PRAMADIYO BUSONO, Ak., M.AP., CA.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19641015 198603 1 002